



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1391);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
15. Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 149);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 158);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 114);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah OPD yang melaksanakan tugas pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah OPD yang melaksanakan tugas urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
19. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 dikecualikan untuk retribusi daerah yang disetorkan ke kas BLUD, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp26.585.991.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. DBH Pajak Daerah sebesar Rp23.710.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah; dan
 - b. DBH Retribusi Daerah sebesar Rp2.875.991.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (4) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan secara merata dan berkeadilan untuk setiap Desa berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula
- (5) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :
 - a. DBH Pajak Daerah
$$DBHPx = DBHPy + DBHPz$$
Keterangan :
DBHPx : DBH Pajak Daerah setiap Desa
DBHPy : Alokasi Dasar setiap Desa
DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa
 - b. DBH Retribusi Daerah
$$DBHRx = DBHry + DBHRz$$
Keterangan :
DBHRx : DBH Retribusi Daerah setiap Desa
DBHry : Alokasi Dasar setiap Desa
DBHRz : Alokasi Formula setiap Desa
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa.
- (3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :
 - a. DBH Pajak Daerah
$$DBHPz = Px + DBHP$$

Keterangan :

DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa

Px : Rasio realisasi Pajak Daerah setiap Desa terhadap total realisasi Pajak Daerah Desa pada Kabupaten

DBHP : Pagu Alokasi Formula DBH Pajak Daerah

b. DBH Retribusi Daerah

$$DBHRMx = Rx + DBHP$$

Keterangan :

DBHRMx : DBH Retribusi Daerah Proporsional setiap Desa

Rx : rasio realisasi Retribusi Daerah setiap Desa terhadap total realisasi Retribusi Daerah Desa pada Kabupaten

DBHP : Pagu Alokasi Formula DBH Retribusi Daerah

- (4) Rasio realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah masing-masing Desa dari Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Kertas kerja perhitungan rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (3) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan :
 - a. Triwulan I paling cepat bulan April sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;
 - b. Triwulan II paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;
 - c. Triwulan III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa; dan
 - d. Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (4) Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 10 Desember tahun berkenaan dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat mengenai Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025.
- (3) Evaluasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Cq. PPKD dapat melakukan penundaan penyaluran DBH Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (5) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan atas rekomendasi penundaan penyaluran yang disampaikan oleh Kepala DPMD.
- (6) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) DPMD melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) BAPENDA melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan kegiatan penunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (4) BKAD melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana transfer kepada Desa.
- (5) Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KERTAS KERJA PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Kecamatan / Desa	BOBOT DESA	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			KETERANGAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 x Pagu Alokasi Formula	6 = 4 + 5	7	8 = 3 x Pagu Alokasi Formula	9 = 7 + 8	10
62.01.01	KECAMATAN KUMAI								
62.01.01.2001	Sungai Cabang	0,0155	175.629.600,00	147.198.400,00	322.828.000,00	21.303.600,00	17.855.000,00	39.158.600,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	0,0007	175.629.600,00	6.933.000,00	182.562.600,00	21.303.600,00	841.000,00	22.144.600,00	
62.01.01.2003	Sabuai	0,0096	175.629.600,00	91.195.200,00	266.824.800,00	21.303.600,00	11.061.900,00	32.365.500,00	
62.01.01.2004	Keraya	0,0076	175.629.600,00	71.636.000,00	247.265.600,00	21.303.600,00	8.689.400,00	29.993.000,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	0,0225	175.629.600,00	213.077.000,00	388.706.600,00	21.303.600,00	25.846.000,00	47.149.600,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	0,0068	175.629.600,00	64.525.600,00	240.155.200,00	21.303.600,00	7.826.900,00	29.130.500,00	
62.01.01.2007	Kubu	0,0149	175.629.600,00	140.928.700,00	316.558.300,00	21.303.600,00	17.094.500,00	38.398.100,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	0,0220	175.629.600,00	208.440.500,00	384.070.100,00	21.303.600,00	25.283.500,00	46.587.100,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	0,0235	175.629.600,00	222.596.300,00	398.225.900,00	21.303.600,00	27.000.600,00	48.304.200,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	0,0318	175.629.600,00	301.684.200,00	477.313.800,00	21.303.600,00	36.593.900,00	57.897.500,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	0,0065	175.629.600,00	61.928.200,00	237.557.800,00	21.303.600,00	7.511.800,00	28.815.400,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	0,0188	175.629.600,00	178.395.900,00	354.025.500,00	21.303.600,00	21.639.200,00	42.942.800,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	0,0193	175.629.600,00	183.260.600,00	358.890.200,00	21.303.600,00	22.229.300,00	43.532.900,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	0,0133	175.629.600,00	126.376.900,00	302.006.500,00	21.303.600,00	15.329.300,00	36.632.900,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	0,0078	175.629.600,00	74.294.200,00	249.923.800,00	21.303.600,00	9.011.800,00	30.315.400,00	
	SUB TOTAL	0,2206	2.634.444.000,00	2.092.470.700,00	4.726.914.700,00	319.554.000,00	253.814.100,00	573.368.100,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN								
62.01.02.2001	Tanjung Putri	0,0089	175.629.600,00	84.328.200,00	259.957.800,00	21.303.600,00	10.228.900,00	31.532.500,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	0,0303	175.629.600,00	287.098.600,00	462.728.200,00	21.303.600,00	34.824.700,00	56.128.300,00	
62.01.02.2010	Rangda	0,0358	175.629.600,00	339.481.600,00	515.111.200,00	21.303.600,00	41.178.700,00	62.482.300,00	
62.01.02.2011	Kenambui	0,0037	175.629.600,00	35.252.200,00	210.881.800,00	21.303.600,00	4.276.000,00	25.579.600,00	
62.01.02.2012	Runtu	0,0278	175.629.600,00	263.859.100,00	439.488.700,00	21.303.600,00	32.005.800,00	53.309.400,00	
62.01.02.2013	Umpang	0,0056	175.629.600,00	53.182.000,00	228.811.600,00	21.303.600,00	6.450.900,00	27.754.500,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	0,0062	175.629.600,00	58.607.000,00	234.236.600,00	21.303.600,00	7.108.900,00	28.412.500,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	0,0072	175.629.600,00	68.060.600,00	243.690.200,00	21.303.600,00	8.255.700,00	29.559.300,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	0,0130	175.629.600,00	123.181.600,00	298.811.200,00	21.303.600,00	14.941.800,00	36.245.400,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	0,0300	175.629.600,00	284.221.900,00	459.851.500,00	21.303.600,00	34.475.700,00	55.779.300,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	0,0376	175.629.600,00	356.447.500,00	532.077.100,00	21.303.600,00	43.236.600,00	64.540.200,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	0,0157	175.629.600,00	148.594.700,00	324.224.300,00	21.303.600,00	18.024.300,00	39.327.900,00	
62.01.02.2020	Sulung	0,0053	175.629.600,00	49.852.000,00	225.481.600,00	21.303.600,00	6.047.000,00	27.350.600,00	
	SUB TOTAL	0,2269	2.283.184.800,00	2.152.167.000,00	4.435.351.800,00	276.946.800,00	261.055.000,00	538.001.800,00	

NO	Kecamatan / Desa	BOBOT DESA	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			KETERANGAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 x Pagu Alokasi Formula	6 = 4 + 5	7	8 = 3 x Pagu Alokasi Formula	9 = 7 + 8	10
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA								
62.01.03.2001	Babual Baboti	0,0028	175.629.600,00	26.365.700,00	201.995.300,00	21.303.600,00	3.198.100,00	24.501.700,00	
62.01.03.2002	Tempayung	0,0049	175.629.600,00	46.132.300,00	221.761.900,00	21.303.600,00	5.595.800,00	26.899.400,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	0,0059	175.629.600,00	55.523.700,00	231.153.300,00	21.303.600,00	6.735.000,00	28.038.600,00	
62.01.03.2004	Kinjil	0,0038	175.629.600,00	35.880.300,00	211.509.900,00	21.303.600,00	4.352.200,00	25.655.800,00	
62.01.03.2005	Dawak	0,0062	175.629.600,00	59.160.000,00	234.789.600,00	21.303.600,00	7.176.000,00	28.479.600,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	0,0231	175.629.600,00	219.054.100,00	394.683.700,00	21.303.600,00	26.571.000,00	47.874.600,00	
62.01.03.2009	Lalang	0,0101	175.629.600,00	95.880.000,00	271.509.600,00	21.303.600,00	11.630.100,00	32.933.700,00	
62.01.03.2010	Rungun	0,0130	175.629.600,00	123.204.900,00	298.834.500,00	21.303.600,00	14.944.600,00	36.248.200,00	
62.01.03.2011	Kondang	0,0061	175.629.600,00	58.311.400,00	233.941.000,00	21.303.600,00	7.073.100,00	28.376.700,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	0,0054	175.629.600,00	50.930.500,00	226.560.100,00	21.303.600,00	6.177.800,00	27.481.400,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	0,0045	175.629.600,00	42.989.100,00	218.618.700,00	21.303.600,00	5.214.500,00	26.518.100,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	0,0054	175.629.600,00	51.324.500,00	226.954.100,00	21.303.600,00	6.225.600,00	27.529.200,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	0,0055	175.629.600,00	52.320.100,00	227.949.700,00	21.303.600,00	6.346.400,00	27.650.000,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	0,0044	175.629.600,00	41.803.800,00	217.433.400,00	21.303.600,00	5.070.800,00	26.374.400,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	0,0040	175.629.600,00	38.305.200,00	213.934.800,00	21.303.600,00	4.646.400,00	25.950.000,00	
	SUB TOTAL	0,1051	2.634.444.000,00	997.185.600,00	3.631.629.600,00	319.554.000,00	120.957.400,00	440.511.400,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA								
62.01.04.2001	Nanga Mua	0,0041	175.629.600,00	38.559.800,00	214.189.400,00	21.303.600,00	4.677.200,00	25.980.800,00	
62.01.04.2003	Sukarami	0,0038	175.629.600,00	35.786.500,00	211.416.100,00	21.303.600,00	4.340.900,00	25.644.500,00	
62.01.04.2004	Gandis	0,0534	175.629.600,00	506.122.700,00	681.752.300,00	21.303.600,00	61.392.000,00	82.695.600,00	
62.01.04.2005	Kerabu	0,0038	175.629.600,00	35.786.500,00	211.416.100,00	21.303.600,00	4.340.900,00	25.644.500,00	
62.01.04.2006	Sambi	0,0029	175.629.600,00	27.936.200,00	203.565.800,00	21.303.600,00	3.388.600,00	24.692.200,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	0,0753	175.629.600,00	714.382.100,00	890.011.700,00	21.303.600,00	86.653.600,00	107.957.200,00	
62.01.04.2008	Pandau	0,0036	175.629.600,00	33.723.600,00	209.353.200,00	21.303.600,00	4.090.600,00	25.394.200,00	
62.01.04.2009	Riam	0,0035	175.629.600,00	32.876.300,00	208.505.900,00	21.303.600,00	3.987.900,00	25.291.500,00	
62.01.04.2010	Panahan	0,0035	175.629.600,00	32.892.400,00	208.522.000,00	21.303.600,00	3.989.800,00	25.293.400,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	0,0000	175.629.600,00	2.200,00	175.631.800,00	21.303.600,00	2.600,00	21.306.200,00	
	SUB TOTAL	0,1537	1.756.296.000,00	1.458.068.300,00	3.214.364.300,00	213.036.000,00	176.864.100,00	389.900.100,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA								
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	0,0040	175.629.600,00	38.394.200,00	214.023.800,00	21.303.600,00	4.657.200,00	25.960.800,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	0,0404	175.629.600,00	382.836.500,00	558.466.100,00	21.303.600,00	46.437.600,00	67.741.200,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	0,0045	175.629.600,00	42.690.700,00	218.320.300,00	21.303.600,00	5.178.300,00	26.481.900,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	0,0047	175.629.600,00	44.964.500,00	220.594.100,00	21.303.600,00	5.454.100,00	26.757.700,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	0,0034	175.629.600,00	32.568.800,00	208.198.400,00	21.303.600,00	3.950.600,00	25.254.200,00	
62.01.05.2006	Purbasari	0,0054	175.629.600,00	51.457.100,00	227.086.700,00	21.303.600,00	6.241.700,00	27.545.300,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	0,0060	175.629.600,00	56.911.200,00	232.540.800,00	21.303.600,00	6.903.200,00	28.206.800,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	0,0037	175.629.600,00	35.458.200,00	211.087.800,00	21.303.600,00	4.301.000,00	25.604.600,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	0,0171	175.629.600,00	161.896.700,00	337.526.300,00	21.303.600,00	19.637.800,00	40.941.400,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	0,0097	175.629.600,00	91.610.300,00	267.239.900,00	21.303.600,00	11.112.200,00	32.415.800,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	0,0097	175.629.600,00	92.415.700,00	268.045.300,00	21.303.600,00	11.209.900,00	32.513.500,00	
	SUB TOTAL	0,1087	1.931.925.600,00	1.031.203.900,00	2.963.129.500,00	234.339.600,00	125.083.600,00	359.423.200,00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG								
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	0,0035	175.629.600,00	33.568.000,00	209.197.600,00	21.303.600,00	4.071.800,00	25.375.400,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	0,0026	175.629.600,00	24.710.600,00	200.340.200,00	21.303.600,00	2.997.400,00	24.301.000,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	0,0138	175.629.600,00	130.698.400,00	306.328.000,00	21.303.600,00	15.853.500,00	37.157.100,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	0,0042	175.629.600,00	40.020.100,00	215.649.700,00	21.303.600,00	4.854.400,00	26.158.000,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	0,0139	175.629.600,00	131.966.000,00	307.595.600,00	21.303.600,00	16.007.300,00	37.310.900,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	0,0186	175.629.600,00	176.659.300,00	352.288.900,00	21.303.600,00	21.428.500,00	42.732.100,00	

NO	Kecamatan / Desa	BOBOT DESA	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			KETERANGAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 x Pagu Alokasi Formula	6 = 4 + 5	7	8 = 3 x Pagu Alokasi Formula	9 = 7 + 8	10
62.01.06.2007	Amin Jaya	0,0054	175.629.600,00	51.463.800,00	227.093.400,00	21.303.600,00	6.242.500,00	27.546.100,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	0,0224	175.629.600,00	212.422.200,00	388.051.800,00	21.303.600,00	25.766.500,00	47.070.100,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	0,0242	175.629.600,00	229.378.500,00	405.008.100,00	21.303.600,00	27.823.300,00	49.126.900,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	0,0080	175.629.600,00	75.612.000,00	251.241.600,00	21.303.600,00	9.171.600,00	30.475.200,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	0,0144	175.629.600,00	136.729.300,00	312.358.900,00	21.303.600,00	16.585.100,00	37.888.700,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	0,0057	175.629.600,00	54.499.000,00	230.128.600,00	21.303.600,00	6.610.700,00	27.914.300,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	0,0036	175.629.600,00	34.290.400,00	209.920.000,00	21.303.600,00	4.159.400,00	25.463.000,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	0,0196	175.629.600,00	185.981.700,00	361.611.300,00	21.303.600,00	22.559.300,00	43.862.900,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	0,0085	175.629.600,00	80.898.800,00	256.528.400,00	21.303.600,00	9.812.900,00	31.116.500,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	0,0133	175.629.600,00	125.821.100,00	301.450.700,00	21.303.600,00	15.261.900,00	36.565.500,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	0,0030	175.629.600,00	28.187.700,00	203.817.300,00	21.303.600,00	3.419.100,00	24.722.700,00	
	Sub Total	0,1848	2.985.703.200,00	1.752.906.900,00	4.738.610.100,00	362.161.200,00	212.625.200,00	574.786.400,00	
	TOTAL	1,00000	14.225.997.600,00	9.484.002.400,00	23.710.000.000,00	1.725.591.600,00	1.150.399.400,00	2.875.991.000,00	

URAIAN	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
PAGU	23.710.000.000,00	2.875.991.000,00	
Pagu Bagi Hasil Merata (PAGU x 60%)	14.226.000.000,00	1.725.594.600,00	Perbedaan dengan rincian perhitungan dikarenakan hasil pembulatan
Bagi Hasil Merata Per Desa (Bagi Hasil Merata/Jumlah Desa)	175.629.629,63	21.303.637,04	
Bagi Hasil Merata Per Desa Pembulatan	175.629.600,00	21.303.600,00	
Pagu Bagi Hasil Proporsional (PAGU x 40%)	9.484.000.000,00	1.150.396.400,00	Perbedaan dengan rincian perhitungan dikarenakan hasil pembulatan

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	322.828.000,00	39.158.600,00	361.986.600,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	182.562.600,00	22.144.600,00	204.707.200,00	
62.01.01.2003	Sabuai	266.824.800,00	32.365.500,00	299.190.300,00	
62.01.01.2004	Keraya	247.265.600,00	29.993.000,00	277.258.600,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	388.706.600,00	47.149.600,00	435.856.200,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	240.155.200,00	29.130.500,00	269.285.700,00	
62.01.01.2007	Kubu	316.558.300,00	38.398.100,00	354.956.400,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	384.070.100,00	46.587.100,00	430.657.200,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	398.225.900,00	48.304.200,00	446.530.100,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	477.313.800,00	57.897.500,00	535.211.300,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	237.557.800,00	28.815.400,00	266.373.200,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	354.025.500,00	42.942.800,00	396.968.300,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	358.890.200,00	43.532.900,00	402.423.100,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	302.006.500,00	36.632.900,00	338.639.400,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	249.923.800,00	30.315.400,00	280.239.200,00	
	SUB TOTAL	4.726.914.700,00	573.368.100,00	5.300.282.800,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	259.957.800,00	31.532.500,00	291.490.300,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	462.728.200,00	56.128.300,00	518.856.500,00	
62.01.02.2010	Rangda	515.111.200,00	62.482.300,00	577.593.500,00	
62.01.02.2011	Kenambui	210.881.800,00	25.579.600,00	236.461.400,00	
62.01.02.2012	Runtu	439.488.700,00	53.309.400,00	492.798.100,00	
62.01.02.2013	Umpang	228.811.600,00	27.754.500,00	256.566.100,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	234.236.600,00	28.412.500,00	262.649.100,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	243.690.200,00	29.559.300,00	273.249.500,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	298.811.200,00	36.245.400,00	335.056.600,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	459.851.500,00	55.779.300,00	515.630.800,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	532.077.100,00	64.540.200,00	596.617.300,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	324.224.300,00	39.327.900,00	363.552.200,00	
62.01.02.2020	Sulung	225.481.600,00	27.350.600,00	252.832.200,00	
	SUB TOTAL	4.435.351.800,00	538.001.800,00	4.973.353.600,00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti	201.995.300,00	24.501.700,00	226.497.000,00	
62.01.03.2002	Tempayung	221.761.900,00	26.899.400,00	248.661.300,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	231.153.300,00	28.038.600,00	259.191.900,00	
62.01.03.2004	Kinjil	211.509.900,00	25.655.800,00	237.165.700,00	
62.01.03.2005	Dawak	234.789.600,00	28.479.600,00	263.269.200,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	394.683.700,00	47.874.600,00	442.558.300,00	
62.01.03.2009	Lalang	271.509.600,00	32.933.700,00	304.443.300,00	
62.01.03.2010	Rungun	298.834.500,00	36.248.200,00	335.082.700,00	
62.01.03.2011	Kondang	233.941.000,00	28.376.700,00	262.317.700,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	226.560.100,00	27.481.400,00	254.041.500,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	218.618.700,00	26.518.100,00	245.136.800,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	226.954.100,00	27.529.200,00	254.483.300,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	227.949.700,00	27.650.000,00	255.599.700,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	217.433.400,00	26.374.400,00	243.807.800,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	213.934.800,00	25.950.000,00	239.884.800,00	
	SUB TOTAL	3.631.629.600,00	440.511.400,00	4.072.141.000,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	214.189.400,00	25.980.800,00	240.170.200,00	
62.01.04.2003	Sukarami	211.416.100,00	25.644.500,00	237.060.600,00	
62.01.04.2004	Gandis	681.752.300,00	82.695.600,00	764.447.900,00	
62.01.04.2005	Kerabu	211.416.100,00	25.644.500,00	237.060.600,00	
62.01.04.2006	Sambi	203.565.800,00	24.692.200,00	228.258.000,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	890.011.700,00	107.957.200,00	997.968.900,00	
62.01.04.2008	Pandau	209.353.200,00	25.394.200,00	234.747.400,00	
62.01.04.2009	Riam	208.505.900,00	25.291.500,00	233.797.400,00	
62.01.04.2010	Panahan	208.522.000,00	25.293.400,00	233.815.400,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	175.631.800,00	21.306.200,00	196.938.000,00	
	SUB TOTAL	3.214.364.300,00	389.900.100,00	3.604.264.400,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	214.023.800,00	25.960.800,00	239.984.600,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	558.466.100,00	67.741.200,00	626.207.300,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	218.320.300,00	26.481.900,00	244.802.200,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	220.594.100,00	26.757.700,00	247.351.800,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	208.198.400,00	25.254.200,00	233.452.600,00	
62.01.05.2006	Purbasari	227.086.700,00	27.545.300,00	254.632.000,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	232.540.800,00	28.206.800,00	260.747.600,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	211.087.800,00	25.604.600,00	236.692.400,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	337.526.300,00	40.941.400,00	378.467.700,00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.05.2010	Sungai Melawen	267.239.900,00	32.415.800,00	299.655.700,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	268.045.300,00	32.513.500,00	300.558.800,00	
	SUB TOTAL	2.963.129.500,00	359.423.200,00	3.322.552.700,00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	209.197.600,00	25.375.400,00	234.573.000,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	200.340.200,00	24.301.000,00	224.641.200,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	306.328.000,00	37.157.100,00	343.485.100,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	215.649.700,00	26.158.000,00	241.807.700,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	307.595.600,00	37.310.900,00	344.906.500,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	352.288.900,00	42.732.100,00	395.021.000,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	227.093.400,00	27.546.100,00	254.639.500,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	388.051.800,00	47.070.100,00	435.121.900,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	405.008.100,00	49.126.900,00	454.135.000,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	251.241.600,00	30.475.200,00	281.716.800,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	312.358.900,00	37.888.700,00	350.247.600,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	230.128.600,00	27.914.300,00	258.042.900,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	209.920.000,00	25.463.000,00	235.383.000,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	361.611.300,00	43.862.900,00	405.474.200,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	256.528.400,00	31.116.500,00	287.644.900,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	301.450.700,00	36.565.500,00	338.016.200,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	203.817.300,00	24.722.700,00	228.540.000,00	
	SUB TOTAL	4.738.610.100,00	574.786.400,00	5.313.396.500,00	
	TOTAL	23.710.000.000,00	2.875.991.000,00	26.585.991.000,00	

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

